HISTORIA VITAE
Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

HISTORIA VITAE, *Vol. 02, No.01, April 2022*

PERKEMBANGAN PABRIK GULA COLOMADU DAN PERUBAHAN KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT TAHUN 1990-1998

Nalurita Rizkiana Virgin
Universitas Negeri Yogyakarta
Email : naluritarizkiana.2019@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Diberlakukannya *Agrarische Wet* tahun 1870 menyatakan bahwa pihak luar atau pihak swasta memiliki kesempatan untuk menjalankan usahanya di kawasan Hindia Belanda. Bersamaan dengan hal ini, banyak pihak swasta yang tertarik untuk mendirikan usaha di bidang industri, khususnya industri perkebuan gula. Menyikapi hal ini, tidak sedikit pengusaha bumiputera tertarik untuk mendirikan industri gula yang pada kala itu memiliki pangsa menjanjikan, seperti salah satunya yakni pihak Praja Mangkunegaran. Kemunculan industri gula seperti yang dipelopori oleh pihak Mangkunegaran ini tidak terlepas dari peranan Mangkunegara IV (1853-1881) yang dinilai memiliki ciri usaha kapitalisme priyayi atau menggunakan keuntungan yang diperoleh dari produksi modal sebagai pengembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan trah dan rakyatnya. Tujuan penelitian ini ialah menjelaskan megenai perkembangan pabrik gula Colomadu beserta pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar pada tahun 1990-1998. Adapun metodologi penelitian yang digunakan ialah metodologi penelitian sejarah mulai dari heuristic, interpretasi, kritik sumber sampai dengan histroriografi. Banyak penemuan yang bisa diketahui dari penelitian ini seperti undang-undang agrarian tentang penanaman tebu, kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang agrarian, perubahan pola kehidupan dan perekonomian masyarakat serta hilangnya tradisi panen tebu. Melalui tulisan ini, pembaca nantinya akan mendapatkan berbagai informasi terkait perkembangan pabrik gula colomadu pada tahun 1990-1998 beserta pengaruhnya dalam bidang ekonomi.

Kata kunci : *Pabrik gula Colomadu, Kebijakan Pemerintah, Perekonomian Masyarakat*

ABSTRACT

The enactment of Agrarische Wet in 1870 stated that outsiders or private parties had the opportunity to run their business in the Dutch East Indies region. Along with this, many private parties are interested in setting up business in the industrial sector, especially the sugar plantation industry. In response to this, many Bumiputera entrepreneurs were interested in establishing a sugar industry which at that time had a promising market share, such as the Mangkunegaran Praja party. The emergence of the sugar industry as pioneered by the Mangkunegaran cannot be separated from the role of Mangkunegara IV (1853-1881) who is considered to have the business characteristics of priyayi capitalism or uses the profits obtained from capital production as business development and meeting the needs of the breed and its people. The purpose of this study is to explain the development of the Colomadu sugar factory and its influence on the economy of the surrounding community in 1990-1998. The research methodology used is a historical research meethodology ranging from heuristics, interpretations, source criticism to histroriography. Many discovries can be made from this research, such as the

agrarian law on sugar cane cultivation, the policies of the New Order government in the agrarian sector, changes in the pattern of life and the economy of the community and the loss of the tradition of harvesting sugar cane. Through this paper, readers will get various information related to the development of the Colomadu sugar factory in 1990-1998 and its impact on the economy.

Keywords*: Colomadu sugar factory, Government Policy, Community Economy*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk peninggalan kejayaan masa lampau Mangkunegaran, pabrik gula Colomadu kerap juga disebut sebagai saksi bisu terhadap kejayaan agroindustri di masa kolonial. Seiring perkembangannya, pabrik gula ini banyak memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, khususnya di bidang sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan keberadaan pabrik gula pada kala itu banyak menyerap tenaga kerja dari berbagai bidang keahlian mulai dari teknisi mesin, ahli lokomotif tebu, supir bahkan sampai dengan buruh tani atau pembabat tebu.

Seiring perkembangannya, pemerintah ingin kembali meraih kejayaan industri gula layaknya tahun 1930-an, seperti halnya pada masa orde baru yakni tahun 1985 ketika Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras. Berkaca dari hal itu, pemerintah ingin kembali mencoba menegakkan kejayaan dalam bidang yang lain yakni melalui perkebunan sebagai bahan utama industri gula pasir.

Perkembangan pabrik gula ini dinilai banyak membawa dampak positif, khususnya bagi kemajuan perdagangan global dan perubahan perekonomian lokal.. Tidak hanya bagi pihak Mangkunegaran yang mampu membayar hutang-hutangnya sebagai modal ketika awal pembangunan pabrik[1], melainkan juga manajemen dalam pabrik yang tergorganisir dengan baik. Lain halnya ketika Jepang mulai masuk ke wilayah Surakarta dan merubah semua tatanan yang semula telah dijalankan.

Hal tersebut terbukti dengan adanya pergantian superintenden yang semula dijabat oleh orang Belanda diganti oleh orang Bumiputera.[2] Bahkan, selang beberapa tahun atau tidak lama usai penguasaan Jepang, industri gula yang semula dikelola untuk kepentingan rakyat dan Mangkunegaran harus beralih kekuasaan ke tangan Pemerintah Republik Indonesia, terlebih ketika terjadi krisis sosial politik di Surakarta tahun 1946 yang berujung pada berakhirnya status kepengurusan oleh pihak Mangkunegaran atau dengan kata lain industri gula dinasionalisasikan. Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pengelolaan perusahaan milik Mangkunegaran ini, maka pemerintah RI mendirikan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI).[3]

Ketika memasuki masa orde baru terdapat kebijakan dalam bidang agraria yang diterapkan oleh pemerintah yakni program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) untuk mendorong masyarakat agar mau menanam tebu. Hal ini dilakukan oleh pemerintah orde baru yang banyak memfokuskan pada pertumbuhan produksi, ekonomi dan penataan struktur agraria. Dalam pelaksanaannya, sistem TRI ini pada kenyatannya bersifat memaksa atau dengan kata lain mengharuskan masyarakat untuk menenam tebu agar mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Dalam hal ini, petani

[1] Wasino. (2004). "*Nationalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran*" Makalah disampaikan dalam Workshop on the Economic Side of Decolonization, Jointly Organizied by LIPI, NIOD, PPSAT-UGM dan Program Studi Sejarah Pasca Sarjana UGM. Hlm: 3.

[2] *Ibid*. hlm: 4.

[3] *Ibid*. hlm: 4.

mendapat pengawasan langsung dari elite-elite desa yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengawas sekaligus pemberi teladan dan contoh terhadap penanaman dan perawatan tebu yang baik.

Sementara itu, terdapat beberapa hal seperti diantaranya yakni pembebanan utang oleh pabrik gula berupa biaya penjagaan lahan, biaya obat, biaya pupuk dan biaya pembelian bibit sebelum masa panen tiba. Ditambah lagi, biaya giling tebu dan jasa angkutan juga masih menjadi tanggungan masing-masing petani. Oleh sebab itu, pabrik gula mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku atau dengan kata lain mengakibatkan kegagalan pelaksanaan sistem TRI di kawasan Colomadu.

Disamping itu, terdapat alasan lain yakni adanya perubahan daerah Colomadu menjadi wilayah perkotaan seiring perkembangan kawasan Solo Raya yang dinamis. Banyak lahan tebu dialih fungsikan menjadi area persawahan dan pemukiman penduduk, bahkan daerah Colomadu ini menjadi sasaran bagi masyarakat untuk digunakan sebagai lahan pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat kota. Sebagai akibatnya, pabrik gula Colomadu ditutup oleh PTPN IX pada 1 Mei 1998. Dengan demikian, melalui artikel ini penulis mengkaji mengenai perkembangan pabrik gula Colomadu, mulai dari sejarah perjalanan gula ke Nusantara, proses pendirian pabrik serta pengaruhnya dalam perekonomian masyarakat pada periode tahun 1990-1998.

METODE PENELITIAN

Penulis meneliti karya ilmiah tentang Perkembangan Pabrik Gula Colomadu dan Perubahan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Tahun 1990-1998 dengan metode penelitian historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, jejak dan peninggalan masa lampau. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian historis ialah pengumpulan sumber-sumber atau heuristik, verifikasi atau memberikan kritik dari setiap sumber, interpretasi dan penulisan.[4]

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Sumber Primer berupa sumber lisan diperoleh dari kesaksian dari beberapa mantan karyawan pabrik gula colomadu yang merasakan dampak secara langsung terkait penutupan pabrik. Sedangkan sumber primer tertulis diperoleh dari surat kabar Jawa Pos pada tahun tersebut. Untuk sumber sekunder penulis menggunakan beberapa buku-buku, skripsi dan karya jurnal ilmiah terkait dengan tema penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Perkembangan Pabrik Gula Colomadu

Keberhasilan pabrik gula di Pulau Jawa pada abad ke 18 secara tidak langsung mampu mendorong berkembangnya kegiatan ekspor sekaligus menempatkan Pulau Jawa sebagai produsen gula terbesar nomor dua di dunia setelah Kuba. oleh sebab itu, tidak heran jika total terdapat 193 pabrik gula di Jawa, termasuk salah satunya yakni Pabrik Gula Colomadu. Pendirian pabrik gula ini bermula ketika Mangkunegara IV mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan lahan tebu di wilayahnya dengan kontur dan topografi yang memungkinkan setelah berkunjung ke rumah menantunya di Demak.

[4] Kuntowijoyo. *Metodologi sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003). Hlm: 29-31.

Dalam hal ini, Mangkunegara IV merupakan sosok bumiputera pertama yang mendirikan pabrik gula di Nusantara. Berbeda dengan kebanyakan priyayi pada umumnya, beliau dikenal sebagai sosok yang luwes, terampil dan memiliki pemikiran yang terbuka. Beberapa prinsip dan pemikirannya berhasil diwariskan secara turun-temurun dan menjadikan industri gula Mangkunegaran memegang peran penting dalam perdagangan gula internasional.

Istilah *Tanah Lungguh* atau kerap disebut *Apanage* merupakan sistem tata kelola dan pemanfataan tanah milik Praja Mangkunegaran yang diterapkan sebelum Mangkunegara IV berkuasa. Sistem tanah ini juga kerap disebut dengan istilah tanah gaji yang dinilai mirip dengan sistem *tanah bengkok* dimana status kepemilikan tetap menjadi milik raja, akan tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya berada penuh di tangan *lungguh* atau orang yang menggarapnya. Pada awalnya lahan ini ditanami beberapa jenis tanaman pangan, namun seiring berjalannya waktu mengalami perubahan karena sebagian besar tanah itu disewakan kepada pengusaha asing sehingga komoditas tanaman yang ada didominasi oleh jenis tanaman perkebunan.

Ditambah lagi, pada tahun 1859-1860 ketika Mangkunegara IV mulai berkuasa, beliau memutuskan untukmenghentikan sistem *tanah lungguh* ini dengan cara menghapuskan kontrak atau menghilangkan perpanjangan sewa *tanah lungguh*. Hal ini dikarenakan beliau beranggapan bahwa sistem industri akan jauh lebih mendatangkan keuntungan. Penarikan *tanah lungguh* mulai dilakukan dari kalangan keluarga raja pada tahun 1862-1871. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan para *patuh*, termasuk *legiun* Mangkunegaran. Tindakan ini mendapat dukungan penuhdari Residen *Niewenhuizen.* Pada tahun 1871, total tanah yang berhasil ditarik mencapai 121,25 *jung* atau 485 *bau* dari lungguh yang diberikan kepada 8 putra Mangkunegara II, dua putra Mangkunegara III, tiga putra Mangkunegara IV dan seorang saudara dari Mangkunegara IV. (Margana, 1997/1998:82).

Mereka yang telah ditariknya tanahnya diberikan tunjangan berupa uang dengan jumlah yang berbeda-beda atau sesuai dengan luas tanah dan rata-rata penghasilan yang diperoleh dari tanah yang sebelumnya di garap. Akan tetapi, terdapat dasar umum dalam penentuan ganti rugi dari setiap *jung*-nya yakni sebesar f 120 per tahun atau f 10 setiap bulannya. Disamping itu, tingkat kesuburan tanah juga berpengaruh dalam penentuan pesangon para lungguh dan beberapa pejabat yang berkuasa di setiap distrik. Sebagai buktinya, pejabat tertinggi di distrik kota yakni *wedana gunung* mendapatkan ganti rugi sebesar f 350 perbulan. Sementara itu, *wedana gunung* di Karanganyar hanya memperoleh gaji sebesar f 300 per bulan. Sama halnya dengan priyayi polisi yang posisinya lebih rendah dibandingkan *wedana gunung*, mereka menerima gaji sekitar f 10 – f 30. Sebagai akibatnya, banyak petani dan bangsawan yang kehilangan mata pencaharian karena kehilangan tanah garapannya. Upaya ini sempat menuai protes, khususnya dari pihak penyewa tanah, mereka beranggapan bahwa keputusan ini tidak murni dari Mangkunegara IV, melainkan terdapat campur tangan orang Belanda dengan latar belakang kepentingan ekonomi dan industri. Dalam hal ini, salah satu tokoh yang dituduh terlibat ialah Residen Surakarta, Busckness. (Margana, 1997/1998:74).

Upaya pembangunan kawasan perkebunan mulai digagas dengan tanaman utama berupa kopi dan gula. Salah satu kawasan yang dinilai sangat potensial jika digunakan sebagai perkebunan tebu ialah kawedanan Malangjiwan, bahkan ditempat itu juga didirikan pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu sebagai wujud kerjasama dan tindak lanjut atas kerjasama Mangkunegaran dengan pihak Belanda, dimana sebelumnya beliau juga kerap disebut telah menjalin hubungan perdagangan dengan komoditas barang yang

laku diperjualbelikan di pasaran VOC. Adapun beberapa alasan yang mendasari dibentuknya pabrik gula oleh Mangkunegaran yakni, pertama gula merupakan salah satu komoditi ekspor yang saat itu sedang naik daun atau dengan kata lain memiliki pangsa pasar yang baik di kancah internasional. Kedua, jenis tanaman perkebunan tebu merupakan jenis tanaman yang sudah biasa ditanam oleh penyewa tanah sebelumnya di daerah Surakarta. Ketiga, sumber pendapatan praja secara tradisional melalui sistem *lungguh* dan pajak dirasa kurang memuaskan. Disamping itu, terdapat faktor lain yakni adanya kemauan internal dari trah Mangkunegaran untuk menonjolkan posisinya di bidang perekonomian. Sistem industri gula ini didirikan meniru dengan sistem eksploitasi Belanda dengan harapan kelak keberadaanya mampu memberikan pengaruh yang luas, tidak hanya pada kalangan raja-raja Jawa, melainkan sampai ke Belanda.

Sebagai langkah awal untuk membangun pabrik gula, mengkunegaran bekerja sama dengan R. Kamp seorang ahli tanah dari Jerman yang ditugaskan untuk meneliti apakah tanah daerah Malang Jiwan cocok jika digunakan sebagai area perkebunan Tebu, mengingat potensi lokasinya sudah sangat mendukung yakni kondisi tanahnya yang subur dan adanya aliran air yang memadai. Setelah penelitian selesai dan perizinan terhadap karisidenan Surakarta telah berhasil diperoleh, maka pabrik gula mulai didirikan pada tanggal 8 Desember 1861 dengan total biaya pembangunan kurang lebih f 400.000. Modal ini diperoleh dari keuntungan perkebunan dan sebagiannya lagi mendapat pinjaman uang dari Mayor Be Biauw Tjwan di Semarang, sosok teman dekat Mangkunegara IV. Pembangunan pabrik gula ini diawali dengan peletakan batu pertama untuk bangunan "Colomadu" yang dalam Bahasa Jawa memiliki arti "gunung madu". Pemberian nama ini mengandung suatu harapan agar kelak pabrik gula pasir yang didirikan oleh Praja Mangkunegaran ini bisa menjadikan pundi-pundi kekayaan layaknya gunung.[5] Selama kurang lebih satu tahun, pabrik gula itu berhasil diresmikan dengan status kepemilikan pribadi dengan pengelolaan sehari-hari berada di tangan administrator yang ahli dalam bidangnya, termasuk R. Kamp dan anaknya G. Smith. Setalah kurang lebih dua tahun berjalan, pabrik gula Colomadu ternyata telah memenuhi syarat jika diajukan menjadi sebuah pabrik gula terbaik pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen yang kerap dikatakan sangat memuaskan pada saat itu. Panen pertama, tahun 1863 dihasilkan sebesar 3700 kuintal gula dari 95 hektar lahan perkebunan atau dengan kata lain rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan yakni 39 kuintal tiap hektar. Selanjutnya mengenai penjualannya dilakukan oleh administrator dengan perantara firma cores De Vries dengan harga f 32 per kuintal.

Keberadaannya sangat membantu penghasilan Praja Mangkunegaran karena berkat keuntungan yang diperoleh, semua hutang-hutang yang awalnya digunakan sebagai modal pembangunan ataupun utang kepada para bekas lungguh dapat dilunasi. Sebagai respon dari keberhasilannya membangun pabrik gula Colomadu, maka beliau kembali mendirikan pabrik gula yang kedua yakni pabrik gula Tasikmadu yang dalam Bahasa jawa berarti sebagai "lautan madu", pabrik kedua ini berlokasi di Sandakara, tidak jauh dari pabrik gula Colomadu. Sama halnya dengan sistem yang dijalankan dalam pabrik gula sebelumnya yakni sistem feudal dimana petani tebu di sekitar kawasan itu diwajibkan untuk menenam tebu tanpa adanya bayaran. Pabrik gula ini digerakkan dengan tenaga air dan uap, sedangkan transportasinya masih menggunakan cikar untuk Solo-Sragen sebelum ditemukannya lintasan kereta api, berbeda dengan jalur Solo-Semarang yang kala itu sudah menggunakan kereta api.

[5] Diyah Wahyuningsih dan Septi Waryani. (2016). *Sejarah Perkebunan Gula Jawa Tengah*. Semarang: Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Hlm: 95.

Mangkunegara IV mengusung pemikiran bahwa seorang Raja tidak hanya ditakdirkan menjadi penguasa atau penerus trah bangsawan, melainkan juga menjaadi seorang pengusaha. Beliau beranggapan bahwa menjadi seorang raja sekaligus pedagang atau pengusaha tidak akan mengurangi martabat atau derajat kebangsawanannya. Disamping itu, beliau juga kerap disebut sebagai pembongkar tradisi kasta dalam ajaran Hindu dimana kaum Brahmana dan Ksatria tidaklah tabu jika mereka juga berprofesi menjadi seorang pedagang layaknya kaum Waisya. Oleh sebab itu, beliau kerap disebut sebagai raja dengan pelopor modernisasi ekonomi yang mampu mengambil kebudayaan barat dan mengkombinasikannya dengan nilai-nilai kebudayaan Jawa. Berangkat dari penjelasan tersebut, perkebunan tebu sekaligus pabrik gula yang berhasil dibangun oleh Mangkunegara IV mampu menunjukkan bahwa dirinya merupakan seorang raja yang memiliki jiwa ekonomi dan etos dagang yang tinggi.[6]

Bebarapa tahun setelah wafatnya Mangkunegara IV, usahanya untuk mewujudkan dasar-dasar ekonomi kerajaan melalui industri mengalami guncangan yang cukup hebat. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yakni adanya krisis ekonomi dunia dan maraknya hama penyakit yang menyerang tanaman tebu sebagai faktor internalnya. Sedangkan faktor eksternalnya berupa kesalahan manajemen keuangan dari Mangkunegara V. Sebagai akibatnya, industri gula Mangkunegaran mengalami kemunduran yang ditandai dengan penurunan pendapatan kurang lebih sebesar f 100.000 (seratus ribu gulden) setiap tahunnya. Disamping itu kesalahan manajemen keuangan yang pada awalnya dilakukan untuk mengatasi krisis justru mempersulit pemenuhan defisit keuangan Mangkunegaran. Adapun beberapa diantaranya seperti melakukan pinjaman kepada pihak swasta di Semarang dengan jaminan sebagian hartanya yang bernilai *verponding* sebesar f 519.000. Selain itu, terdapat pula beberapa pinjaman lain seperti pinjaman dari *faktorij* sebesar f 200.000 dengan jaminan berupa 290 saham *de javache bank* dan 100 saham *nederlandsvhe handelmaatschtappinj* (NHM) warisan ayahnya. Menyikapi hal ini, pemerintah kolonial pada akhirnya mengambil alih seluruh urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk pengelolaan perusahaan dan pabrik-pabrik gula.

Seiring berjalannya waktu bersamaan dengan pergantian kepemimpinan yakni ketika Mangkunegara V telah digantikan oleh Mangkunegara VI, maka kondisi dan kinerja pabrik gula berangsur-angsur semakin membaik. Hal ini tidak terlepas dari usaha Mangkunegara VI untuk memperbaiki perekonomian dengan cara melakukan penghematan terhadap pengeluaran Praja Mangkunegaran. Penghematan yang dilakukan ini seputar gaji pegawai dan pengeluaran untuk pekerjaan umum (pemeliharaan jalan dan sarana pengairan). Adapun beberapa penghematan yang berhasil dilakukan diantaranya yakni mengurangi pengeluaran yang sekiranya masih bisa ditekan seperti misalnya: penghapusan prajurit *Margayuda* (penjaga pintu), *Subamanggala* dan *Brahmantaka* masing-masing sebesar 100 orang, menyatukan pesta baik itu pernikahan atau khitanan keluarga, pembatasan pagelaran wayang kulit atau dengan kata lain wayang hanya digelar pada acara tertentu atau hari-hari besar serta adanya larangan keras untuk melakukan permainan judi dan sabung ayam. Disamping itu, beliau juga menerapkan pengurangan gaji terhadap para bangsawan, bahkan dirinya sendiri juga ikut serta dikurangi gajinya sebesar 40%. Bahkan, tanah tambak Terboyo juga dijual sebagai ganti untuk menebus kembali rumah-rumah di Pendrikan, Semarang yang beberapa waktu lalu sempat digadaikan. Beliau beranggapan bahwa sewa rumah

[6] Muhammad I. B, dkk. 2016. *Bisnis keluarga Mangkunegaran.* Walisongo: jurnal penelitian sosial keagamaan, 24, (1). Hlm: 124.

akan jauh mendatangkan hasil dibandingkan sewa tanah yang banyak beresiko. Sebagai akibatnya, pada tahun 1899 atas permintaan dari Mangkunegara VI, pabrik gula Mangkunegaran dikembalikan pengelolannya kepada pihak Mangkunegaran. Meski demikian, pengelolaan didalamnya masih tetap mewajibkan untuk menggunakan seorang ahli berkebangsaan Belanda sebagai superintendent. (Wasino, 2008:75-76)
Semenjak awal pendiriannya sampai dengan tahun 1942, pabrik gula Colomadu tidak pernah mengalami kesulitan dalam hal pengadaan tanah, tenaga kerja ataupun pemasaran produksinya. Berbeda ketika masa pendudukan Jepang dimana pabrik mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja ataupun area untuk penanaman tebu. Hal ini dikarenakan pada masa pendudukan Jepang banyak terjadi pengalihan fungsi pabrik gula, dalam hal ini pengalihan yang dilakukan disebabkan tujuan pemerintah Jepang yang menginginkan untuk memfokuskan penanaman tanaman pangan dibandingkan tanaman tebu sehingga keberadaan pabrik gula juga ikut serta berkurang. Selain banyak terjadi peralihan dari tanaman tebu ke beras, banyak juga pabrik gula yang dialihfungsikan sebagai pabrik untuk produksi semen, amunisi dan butanol sehingga tidak heran jika hal ini berdampak pada penurunan produksi gula.

Selanjutnya, pada tahun 1946 pemerintahan swapraja Mangkunegaran mulai dihapuskan sehingga status pabrik gula Mangkunegaran mulai dinasionalisasi atau diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal ini semakin kuat ketika Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1947 yang memuat tentang peraturan perkebunan Republik Indonesia yang isinya menjelaskan bahwa pengelolaan pabrik gula Colomadu diambil alih dibawah perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI). Pada pertengahan tahun 1950, organisasi buruh dan barisan tani Indonesia (BTI) menuntut peningkatan uang sewa tanah yang lebih besar kepada pabrik gula Colomadu. Mereka beranggapan bahwa sistem sewa tanah yang dijalankan selama ini masih kurang jelas sehingga mereka menginginkan sistem yang berbeda. Menanggapi hal ini, pemerintah menetapkan secara jelas mengenai harga sewa tanah yang diterapkan pada setiap lahan tebu yang berbeda-beda yakni lahan tebu tunas, tebu bibit ataupun tebu biasa. Berkat adanya penetapan kebijakan ini, aksi boikot para petani berangsur-angsur mulai berkurang. (Wasino, 2004: 10-11).

Pada tahun 1963, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan pemerintah No. 1 tahun 1963 tentang pembentukan badan pimpinan umum perusahaan negara perkebunan gula (BPU-PPNG). Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil produksi mengingat tujuan didirikannya badan ini ialah sebagai badan untuk meningkatkan produksi gula melalui sistem bagi hasil. Dalam hal ini petani akan menerima 25% dari hasil menyewakan tanahnya kepada pabrik gula atau sebesar 60% bagi mereka para petani yang merawat dan mengelola tenaman tebu di lahannya sendiri. Dengan demikian, pabrik gula hanya memproduksi gula saja. (Abdurachman S, 1975:13). Akan tetapi, penetapan kebijakan ini justru tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena adanya inflasi yang mengakibatkan naiknya uang sewa tanah yang ditetapkan sehingga nilai riil uang sewa tanah yang diterima petani sangat merosot.

Sistem bagi hasil ini semakin hari tidak mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan banyak petani justru semakin mengalami kerugian. Pembiayaan yang disediakan oleh KUD tidak dapat memenuhi perawatan tebu sehingga pada tahun 1967 sistem ini dihentikan. Selanjutnya, pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tentang pembubaran BPU-PPNG. Pembubaran badan ini dikarenakan pola manajemen, dimana sentralisasi manajemen hanya menyebabkan keputusan tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu yang kerap kali memberikan

pengaruh buruk terhadap efisiensi dari produksi pabrik gula. (Mubyarto, 1984:49). Bersamaan dengan hal ini, pemerintah juga mengubah kebijakan mengenai pengelolaan gula negara menjadi lebih fundamental dimana sebelumnya gula banyak dijadikan sebagai komoditi ekspor diubah menjadi komoditas bahan pangan lokal pasaran dalam negeri. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencapai stabilitas harga dalam negeri, adapun cara yang ditempuh ialah menunjuk Bulog sebagai agen tunggal pemasaran gula.

B. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Colomadu tahun 1990-1998

Semenjak dikeluarkannya UU No. 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, maka pasokan bahan baku di Pabrik Gula Colomadu mengalami penurunan. hal ini dikarenakan UU ini mengatur tentang kebebasan petani dalam mengolah lahannya sehingga boleh ditanami jenis-jenis tanaman yang sekiranya menguntungkan di daerahnya masing-masing. Sebagai akibatnya, Pabrik Gula Colomadu mengalami penurunan luas areal TRI, terbukti dari data yang berhasil terkumpul yakni luas lahan sekitar 1,735,244 hektar pada tahun 1990 menjadi 1585,782 hektar pada tahun 1993, penurunan ini terus terjadi sampai tahun 1997. Menyikapi hal ini, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 1997 tentang program pengembangan tebu rakyat yang bertujuan untuk memaksimalkan sinergi dan peran tebu rakyat, perusahaan perkebunan dan koperasi dalam pengembangan industri tebu. Akan tetapi, penetapan Inpres ini belum bisa berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan kurang mendapatkan respon yang positif dari petani. Oleh sebab itu, pemerintah mencabut Inpres tersebut dan menggantikannya dengan Inpres No. 5 tahun 1998 yang berisikan mengenai kebebasan petani menanam komoditas yang menguntungkan di daerahnya masing-masing sama halnya dengan ketetapan sebelumnya yakni UU No. 12 tahun 1992.

Diberlakukannya kembali Inpres tersebut mengakibatkan suplai bahan baku Pabrik Gula Colomadu semakin mengalami penurunan yang cukup masif. Sebagian besar petani merasa mendapatkan dukungan penuh dalam pengalihan tanaman tebu menjadi tanaman non-tebu yang sekiranya menguntungkan. Mereka beranggapan bahwa tanaman yang paling menguntungkan adalah padi sehingga alih fungsi lahan tebu menjadi sawah semakin meningkat. Sebagai akibatnya, dominasi tanaman masyarakat pada kala itu ialah padi sedangkan tebu hanya ditanam di tanah-tanah kas desa.

Disamping itu, terdapat perubahan struktur pemukiman penduduk dimana Colomadu yang sebelumnya merupakan daerah pertanian berubah menjadi pemukiman penduduk. Hal ini terjadi karena perkembangan daerah tepian kota yang secara tidak langsung mendorong perekonomian dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan dan pemukiman. Oleh sebab itu, permintaan akan lahan pemukiman terus mengalami peningkatan, sebagai akibatnya banyak sawah pinggir perkotaan dialihfungsikan menjadi area pemukiman. Berangkat dari hal ini, banyak petani yang beralih perosefi menjadi pedagang, wirausaha dan beberapa profesi lain yang sekiranya lebih menjanjikan. Perubahan mata pencaharian ini diakibatkan adanya perubahan cara pandang dimana profesi lain dinilai lebih menjanjikan dibandingkan menjadi petani. Sementara itu, mereka juga menjual sawah-sawah mereka dikarenakan himpitan ekonomi.

Adanya perkembangan penduduk yang semakin pesat setiap tahunnya mengakibatkan kebutuhan akan pemukiman semakin bertambah. Sebagai akibatnya, lahan di sekitar Pabrik Gula Colomadu menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Sementara itu, hiruk pikuk keramaian orang-orang yang sedang melihat proses giling

tebu sudah tidak terlihat lagi. Sama halnya dengan tradisi *Cembengan* yang dahulu sering dilakukan di Pabrik Gula Colomadu sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, tradisi *Cembengan* menjadi salah satu ciri khas atau keunikan tersendiri yang dimiliki oleh pabrik gula Colomadu. *Cembengan* merupakan sebuah tradisi selamatan yang dilakukan oleh kebanyakan pabrik gula di Jawa, termasuk Colomadu menjelang musim giling tebu. *Cembengan* berasal dari kata *Ching Bing* yang berarti sebagai ritual mendoakan arwah nenek moyang khas Tionghoa, dahulu pertama kali dibawa oleh pekerja perkebunan asal Tiongkok yang bekerja di perkebunan milik Kolonial. Tradisi ini tidak boleh ditinggalkan karena taruhannya adalah keselamatan, bahkan dalam penentuan harinya pun harus berdasarkan atas wangsit dari dukun *Cembengan* atau orang yang ahli dalam upacara selamatan giling tebu. Ritual ini diawali dengan ziarah makam pendiri Praja Mangkunegaran disusul dengan pemotongan dua batang tebu pengantin yang esok harinya akan dijadikan tebu pertama saat penggilingan. Setelah hari mulai petang, maka kembali dilakukan ritual berupa peletakan sesaji di beberapa tempat dan mesin-mesin produksi yang sekiranya dianggap vital.

Bersamaan dengan dilakukannya tradisi *Cembengan*, terdapat pula kegiatan pasar malam yang diadakan oleh masyarakat sekitar kawasan Pabrik Gula Colomadu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk menyambut datangnya musim giling tebu. Kegiatan jual beli dilakukan di sekitar Pabrik Gula Colomadu dengan jumlah yang tidak sedikit, mengingat pedagang dan pembeli yang datang tidak hanya berasal dari daerah Colomadu saja, melainkan dari luar daerah. Adapun jenis barang yang diperjual belikan juga cukup beragam, termasuk salah satunya yakni makanan tradisional seperti misalnya es dawet ataupun berondong jagung. Bahkan, tidak jarang juga acara pasar malam ini dibarengi dengan pementasan music dangdut sehingga menambah kemeriahan dan keramaian pasar.

Penutupan Pabrik Gula Colomadu mengakibatkan terjadinya perubahan struktur sosial dan perekonomian masyarakat sekitar yang dulunya bekerja sebagai pegawai di Colomadu. Dalam hal ini, tidak semua mantan pegawai pabrik gula mendapatkan pekerjaan yang sama sehingga perubahan struktur masyarakat mengalami perubahan. Seperti salah satu contohnya ketika mantan mandor pabrik yang kini bekerja di tempat lain hanya sebagai karyawan biasa. Tidak hanya itu, melainkan juga terjadi perubahan hubungan sosial yang ditandai dengan minimnya interaksi dan hubungan kerja sama yang erat layaknya dahulu ketika masih sama-sama menjadi pegawai pabrik. Setelah penutupan pabrik dan mereka banyak beralih ke pekerjaan yang lain, maka intensitas pertemuan dan interakasi juga semakin berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita tarik kesimpulan dalam beberapa poin. Adapun beberapa diantaranya yakni tradisi wirausaha di kalangan bangsawan bumiputera Jawa yang tidak hilang meskipun terdapat dominasi politik kolonial. Selanjutnya, mengenai kemunculan perkebunan tebu yang pada akhirnya berkembang menjadi pabrik gula bukanlah karena faktor struktural sebagai akibat kebijakan kolonial saja, melainkan juga adanya upaya kreativitas Mangkunegara IV

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Wasino. (2007). *Kapitalisme bumiputera: perubahan masyarakat Mangkunegaran.* Yogyakarta: LKIS printing.

Daryono. (2007). *Etos dagang orang Jawa: pengalaman Mangkunegara IV.* Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Mubyarto, dkk. (1991). *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Abdurrahman, D. (1999). *Metode penelitian sosial*. Yogyakarta: Logos Wacana.

Sumodisastro, H. (1985). *Pembangunan ekonomi Indonesia.* Jakarta: PT. Gunung Agung.

Santosa, I. (2011). *Legiun Mangkunegaran (1808-1942).* Jakarta: Kompas.

Saputra, S. W. (2001). *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV.* Surakarta: Rekso Pustoko Mangkunegaran Istana Mangknegara.

Soetomo, S. (2006). *Sri Mangkunegara IV sebagai penguasa dan pujangga (1853-1881).* Yogyakarta: UGM.

Jurnal:

Wasino. (2005). Mangkunegara IV, raja pengusaha pendiri industry gula Mangkunegaran (1861-1881). *Humaniora,* 17 (1). 31-37.

Birsyada, M.I, dkk. (2016). Bisnis keluarga Mangkunegaran. *Jurnal penelitian sosial keagamaan,* 24, (1). 111-136.

Abidah, S. (2018). Perkembangan perkebunan tebu di Mangkunegaran tahun 1918-1937. *Jurnal ilmu sejarah*, 3 (6). 829-840.

Skripsi:

Ernawati, A. (2011). *Kebijakan ekonomi Mangkunegaran "studi tentang kebijakan ekonomi Mangkunegara V dalam memperbaiki krisis ekonomi tahun 1884".* Surakarta: FKIP.

Fitriana, D. (2011). *Perkembangan industri Gula Colomadu dan perubahan sosial ekonomi masyarakat tahun 1990-1998.* Surakarta: FKIP.

Riyanto, E. (2010). *Perubahan sosial ekonomi masyarakat Colomadu akibat peniduran pabrik gula Colomadu tahun 1998-2007.* Surakarta: Fakultas Seni Rupa dan Sastra.

Makalah:

Wasino. (2004). "*Nationalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran*" Makalah disampaikan dalam Workshop on the Economic Side of Decolonization, Jointly Organizied by LIPI, NIOD, PPSAT-UGM dan Program Studi Sejarah Pasca Sarjana UGM.